

**PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA UNTUK MENUNJANG AKUNTABILITAS
PUBLIK PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO**

**IMPLEMENTATION OF BUDGET BASED PERFORMANCE TO SUPPORT PUBLIC
ACCOUNTABILITY IN GOVERNMENT AT THE ENVIRONMENT AGENCY OF MANADO**

Oleh:

Mandang Gabriel Anton¹

Jantje J. Tinangon²

Inggriani Elim³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

gabrielanton.mandang@yahoo.co.id

tjantjejanny@yahoo.com

inggriani_elim@yahoo.com

Abstrak: Penerapan anggaran akuntabilitas pemerintah memerlukan evaluasi sebagai timbal balik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran, anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Lingkungan Hidup kota Manado sudah sesuai dengan UU 17 Nomor Tahun 2003, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Lingkungan Hidup kota Manado telah melakukan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang bertujuan untuk menunjang akuntabilitas publik secara baik dan benar sesuai dengan UU No.17 tahun 2003.

Kata kunci: anggaran, anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas publik.

Abstract: The implementation of the government budget accountability requires evaluation as a mutual objective to improve accountability and performance of government agencies. Accountability through the budget include the budget until the budget reporting. Budget is needed in the management of resources to accomplish the performance expected by society and to create accountability for society. The purpose of research is to determine the application of performance-based budgeting at the Department of Environment Agency Manado city is in conformity with UU No. 17 tahun 2003, using qualitative descriptive method. The result showed that the Environment Agency Manado city has done a performance-based budget implementation which aims to support public accountability properly and correctly in accordance with UU No.17 tahun 2003.

Keywords: budgets, performance-based budgeting, public accountability.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang lebih menekankan pada kewirausahaan birokrasi pemerintah. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah dapat menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau pemerintah daerah serta merupakan proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah, menjadi relevan dan penting.

Reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujud pemerintah yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintah yang efektif, efisien, profesional dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Lingkungan Hidup kota Manado sudah sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Mahmudi (2011:92) dalam Accounting Principles Board (APB) No.4 menyatakan, bahwa Akuntansi adalah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi yang kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang di maksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif). Pontoh (2013:2), menyatakan akuntansi pada dasarnya menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk di dalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi.

Akuntansi Sektor Publik

Sujarweni (2015:1) menyatakan akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan di butuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Menurut Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan social maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Akuntansi Pemerintahan

Nordiawan, dkk (2012:4) menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dalam badan pemerintahan. Sadeli (2015:6) menyatakan akuntansi

pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau *institutional accounting*, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya. Akuntansi pemerintahan diatur dalam PP. No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- b. SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.
- c. SAP berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah.

Anggaran

Mardiasmo (2011:61) menjelaskan, bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Bastian (2010:164) mengemukakan, bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*Performance based budgeting*) pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output*. Halim (2012:177) menyatakan, bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Bastian (2010:171) mengemukakan, bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada "output" organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi.

Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam buku 2 pedoman penerapan penganggaran berbasis Kinerja (2009: 20), langkah langkah pokok penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategi
2. Sinkronisasi
3. Penyusunan Kerangka Acuan
4. Perumusan/penetapan Indikator Kinerja
5. Pengukuran kinerja
6. Pelaporan kinerja

Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2011:20) menjelaskan, akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Halim (2012:20) berpendapat, bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan denganya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layanannya. Mardiasmo (2011:21) mengategorikan akuntabilitas menjadi dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (internal) dan akuntabilitas horisontal (eksternal).

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Taufiqurrahman (2014), dalam penelitiannya berjudul "Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintahan Daerah: Tantangan Dan Hambatan". Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan banyak hambatan dan kendala di daerah dalam pelaksanaan

anggaran berbasis kinerja semenjak di laksanakan uu 17 tahun 2013 tentang keuangan daerah, berbagai macam faktor ditemukan di daerah adalah belum seluruh Badan/Dinas/Kantor yang memberikan layanan mampu merumuskan dan menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang dapat digunakan sebagai dasar target *outcome* minimum. Dan masih banyak masalah lagi yang dapat dijumpai di daerah. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menganalisis tantangan dan hambatan, sedangkan penelitian saat ini menganalisis kinerja instansi pemerintah dalam peenerapan anggaran berbasis kinerja.

2. Penelitian oleh Wiwik Andriani (2012), dalam penelitiannya berjudul “Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi Pada Politeknik Negeri Padang)”. Tujuannya untuk mengetahui analisis penerapan anggaran berbasis kinerja pada pada Politeknik Negeri Padang. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkan dengan menggunakan informasi kinerja yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja. Suatu pemerintah dapat dikatakan telah menerapkan bentuk sederhana dari penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) jika telah membuat anggaran berdasarkan skala prioritas dan telah menetapkan indikator kinerja untuk mengukur hasil dari pengeluaran anggaran yang dilakukan dan menggunakan indikator tersebut dalam proses atau mekanisme penyusunan anggaran. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada objek penelitian.
3. Penelitian oleh Yohanes Y. Subiantoro (2011), dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kota (Bappeko) Kota Mojokerto”. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti empiris apakah penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja BAPPEKO di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja BAPPEKO di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian.
4. Penelitian oleh Komang Sri Endrayani (2014), dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja)”. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Ketika penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan semakin baik, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian.
5. Penelitian oleh Indriani Yulia Friska (2013), dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)”. Tujuannya adalah untuk mencari bukti empirik apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jambi dengan menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderasinya. Metode penelitian Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan, implementasi, pelaporan anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan secara parsial hanya variabel implementasi dan pelaporan saja yang berpengaruh positif. Perbedaan Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.
6. Penelitian oleh Gita Soraya (2014), dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan”. Tujuannya adalah Untuk mengetahui pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $19,165 > 3,295$. Variabel bebas terhadap Akuntabilitas Kinerja

mempunyai kontribusi sebesar 54,5 persen, sedangkan 45,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Perbedaan pada metode analisis data.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menganalisis masalah dengan cara mendeskripsikannya pada data-data yang sudah ada, berupa data rencana strategi, laporan kinerja, dan laporan tahunan SKPD untuk memberikan gambaran maupun uraian jelas tentang penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Lingkungan Hidup kota Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Manado. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-September tahun 2016

Metode Analisis Data

Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategi
2. Sikronisasi Program Dan Kegiatan
3. Penyusunan Kerangka Acuan
4. Penetapan Indikator Kinerja
5. Pengukuran Kinerja
6. Pelaporan Kinerja

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ada enam hal yang dapat dinilai dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado yaitu sebagai berikut.

Penyusunan Rencana Strategi

Rencana Strategis disusun sebagai pedoman bagi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Manado dalam mencakup pelaksanaan program. Penyusunan Rencana Strategi Badan Lingkungan Hidup Kota Manado, yaitu

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
2. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, Peningkatan pengendalian polusi, Peningkatan kualitas akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Peningkatan disiplin aparatur, Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Sinkronisasi Program Kegiatan

Sistem pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dilakukan agar terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan terhadap pelestarian fungsi lingkungan serta pengendalian terhadap dampak lingkungan sebagai penopang sistem kehidupan.

Penyusunan Kerangka Acuan

Program dan kegiatan yang disusun Badan Lingkungan Hidup Kota Manado bertujuan untuk mencegah dan menghambat laju kerusakan lingkungan dilakukan dengan upaya-upaya pengendalian dan melakukan pemantauan, pengawasan terhadap kegiatan/usaha tidak hanya dilakukan secara aktif oleh sektor swasta dan komponen masyarakat baik secara perorangan maupun melalui organisasi swadaya perlu ditingkatkan dan digalakkan sehingga tercipta suatu peran aktif yang pada akhirnya akan memberdayakan fungsi peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 1. Penetapan Indikator Kinerja

No	Sasaran Capaian	Indikator Kinerja	Kegiatan	Jumlah anggaran per sasaran (Rp)	Kondisi Kinerja pada Periode Tahun 2014 RPJMD	Target Capaian Tahun 2015
1.	Terkendalinya Pencemaran Air Sungai dan sumber-sumber mata air dan pencemaran udara	Peningkatan Mutu Air	1. Pengujian kualitas sungai. 2. Pengujian kualitas sumber mata air 3. Pembuatan sumur resapan 4. Pembuatan lubang biopori. 5. Pembuatan taman adiwiyata. 6. Penanaman pohon.	2.114.652.500	73%	92%
2.	Terawasinya Usaha Kegiatan yang harus memiliki izin lingkungan	Pengawasan Amdal	1. Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	18.500.000	50%	60%
3.	Terlaksananya penegakkan hukum lingkungan	Penegakkan Hukum Lingkungan	1. Penyusunan buku pendataan produk ramah lingkungan 2. Pengujian emisi kendaraan bermotor	112.898.700	80%	100%
4.	Terlaksananya program dan kegiatan pengembangan lingkungan hidup	Presentase Pencapaian Target pengembangan lingkungan hidup	1. pengadaan tong bins. 2. gerobak sampah, 3. penyediaan ATK dan perlengkapan kantor 4. pengadaan AC , kamera, sound system. 5. penyediaan pakaian 6. pemeliharaan kendaraan operasional 7. penyediaan bahan bacaan perundang-undangan 8. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang lingkungan hidup dan keuangan	1.654.700.300	86%	88%

Sumber: Badan Lingkungan Hidup kota Manado.

Tabel 1. Indikator kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado yang merupakan dasar penilaian atau menjadi target pencapaian kinerja berdasarkan sasaran program yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja**Tabel 2. Pengukuran Kinerja**

No	Sasaran Capaian	Kegiatan	Target Capaian		Realisasi		Realisasi anggaran
			Jumlah anggaran per sasaran (Rp)	Target capaian	Jumlah anggaran yang digunakan (Rp)	Realisasi capaian	
1.	Terkendalinya Pencemaran Air Sungai dan sumber-sumber mata air dan pencemaran udara	1. Pengujian kualitas sungai. 2. Pengujian kualitas sumber mata air 3. Pembuatan sumur resapan 4. Pembuatan lubang biopori. 5. Pembuatan taman adiwiyata. 6. Penanaman pohon.	2.114.652.500	92%	2.013.193.250	92%	95,20%
2.	Terawasanya Usaha Kegiatan yang harus memiliki izin lingkungan	1. Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	18.500.000	60%	17.505.000	60%	94,62
3.	Terlaksananya penegakkan hukum lingkungan	1. Penyusunan buku pendataan produk ramah lingkungan 2. Pengujian emisi kendaraan bermotor	112.898.700	100%	88.564.000	100%	78,45%
4.	Terlaksananya program dan kegiatan pengembangan lingkungan hidup	1. pengadaan tong bins. 2. gerobak sampah, 3. penyediaan ATK dan perlengkapan kantor 4. pengadaan AC , kamera, sound system. 5. penyediaan pakaian 6. pemeliharaan kendaraan operasional 7. penyediaan bahan bacaan perundang-undangan 8. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang lingkungan hidup dan keuangan	1.654.700.300	88%	1.530.213.706	88%	92,48%

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Manado

Tabel 2. di atas menunjukkan Pengukuran kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Manado 2014-2015.

Pelaporan Kinerja**Tabel 3. Pelaporan Kinerja**

No	Sasaran Capaian	Kegiatan	Jumlah Anggaran yang Ditetapkan	Jumlah Anggaran yang Digunakan	Presentase Anggaran yang Digunakan
1	Terkendalinya Pencemaran Air Sungai dan sumber-sumber mata air dan pencemaran udara	1. Pengujian kualitas sungai. 2. Pengujian kualitas sumber mata air 3. Pembuatan sumur resapan 4. Pembuatan lubang biopori. 5. Pembuatan taman adiwiyata. 6. Penanaman pohon.	2.114.652.500	2.013.193.250	95,20%
2	Terawasinya Usaha Kegiatan yang harus memiliki izin lingkungan	1. Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	18.500.000	17.505.000	94,62%
3	Terlaksananya penegakkan hukum lingkungan	1. Penyusunan buku pendataan produk ramah lingkungan 2. Pengujian emisi kendaraan bermotor	112.898.700	88.564.000	78,45%
4	Terlaksananya program dan kegiatan pengembangan lingkungan hidup	1. pengadaan tong bins. 2. gerobak sampah, 3. penyediaan ATK dan perlengkapan kantor 4. pengadaan AC , kamera, sound system. 5. penyediaan pakaian 6. pemeliharaan kendaraan operasional 7. penyediaan bahan bacaan perundang-undangan 8. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang lingkungan hidup dan keuangan	1.654.700.300	1.530.213.706	92,48%
Jumlah			3.900.751.500	3.649.475.956	
Gaji dan Tunjangan			2.459.623.200	2.328.929.352	
Total Anggaran Keseluruhan			6.360.374.700	5.978.405.308	

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Manado

Tabel 3. target kegiatan yang ditetapkan telah terealisasi untuk menunjang sasaran program. Pada presentase rencana tingkat capaian target telah menunjukkan hasil yang sangat baik, dibuktikan dengan dijalankannya kegiatan dan presentase realisasi kegiatan yang mencapai target.

Pembahasan

Penyusunan Rencana Strategi

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Lingkungan Hidup Kota Manado telah menyusun rencana strategi berdasarkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana untuk mengatur serta menyelesaikan program yang di landasi dengan kebijakan yang ada. Penyusunan rencana strategi ini meliputi kebutuhan kota manado terlebih bagi masyarakat untuk menjadikan lingkungan hidup kota Manado yang lebih baik lagi.

Sinkronisasi Program Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian, program yang telah di susun pada rencana strategi akan di realisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang akan menunjang program tersebut. Sehingga kegiatan-kegiatan yang di tetapkan akan menghasilkan *output* yang mendukung sasaran/kinerja program Badan Lingkungan Hidup Kota Manado.

Penyusunan Kerangka Acuan

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh Badan Lingkungan Hidup memang sangatlah penting untuk di lakukan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti contoh Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan terlaksananya program ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota manado dengan target capaian tahun 2014-2015, tentu dengan adanya upaya serta tanggungjawab dari pemerintah untuk mensukseskan program terlebih kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian, indikator kinerja merupakan *performance commitment* yang dijadikan dasar atau kriteria penilaian kinerja instansi pemerintah dalam penelitian ini pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado

Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pengukuran kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado menunjukkan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaporan Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Badan Lingkungan Hidup kota Manado telah melakukan tugas dan tanggungjawab terhadap program kegiatan dengan sangat baik. Langkah akhir dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ini menunjukkan laporan hasil kegiatan yang sangat baik, dibuktikan pada tabel 4.4 presentase rencana tingkat pencapaian target Badan Lingkungan Hidup kota Manado, dari seluruh sasaran capaian dan kegiatan telah terealisasikan atau seluruh program kegiatan serta visi dan misi yang sesuai tugas dan fungsi telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Badan Lingkungan Hidup kota Manado.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian telah didapat dan disimpulkan, bahwa Badan Lingkungan Hidup kota Manado telah melakukan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja secara baik dan benar sesuai dengan UU No.17 tahun 2003, dan telah menjalankan tugas dan amanah dengan penuh tanggungjawab dibuktikan dengan terealisasinya program kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya . Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Lingkungan Hidup kota Manado periode 2014-2015 dapat dikatakan bahwa BLH telah berhasil dengan kategori sangat baik (Total Capaian Sasaran diatas 90%) yang tercermin dari capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 94%.

Saran

Saran yang dapat diberikan bagi Badan Lingkungan Hidup kota Manado adalah tetap pertahankan kualitas kinerja yang ada agar pada periode-periode berikutnya, semua rencana serta program kegiatan tetap dijalankan serta dimaksimalkan dengan baik, sehingga pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup pada kota Manado semakin meningkat, agar supaya kota Manado menjadi kota bebas pencemaran dan perusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Tahun 2009 tentang *Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja*.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga. Jakarta
- Halim Abdul & Khusufi Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Gita Soraya. 2014. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan*. Jurnal, Hal 1-10. STIE Multi Data Palembang. (<http://eprints.mdp.ac.id> > Jurnal). Diakses tanggal 06 Desember 2016
- Indriani Yulia Friska. 2013. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variable Moderating* (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi). Jurnal, Hal 75-81. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. (<http://online-journal.unja.ac.id> > article > view). Diakses tanggal 06 Desember 2016
- Komang Sri Endrayan. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). e-Journal S1 Ak Volume 2 No. 1 Tahun 2014 Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. (<http://e-journal.undiksha.ac.id> > article > view). Diakses tanggal 06 Desember 2016
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Cetakan Kedua*. UII Press. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan Deddi. Iswahyudi Sondi Putra. Maulidah Rahmawati 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka. Djakarta.
- Sadeli, Lili. 2015. *Dasar-Dasar Akuntansi. Edisi Pertama*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sujarweni Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Taufiqurrahman. 2014. *Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Daerah: Tantangan dan Hambatan*. Jurnal. Tahun VI, No. 2, Hal 511-519 Juli-Desember 2014. Universitas Airlangga Surabaya, Jejaring Administrasi Publik. (<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp9cde02ab1e2full.pdf>). Diakses tanggal 05 Desember 2016.

- Wiwik Andriani. 2012. *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Pusat (Studi pada politeknik negeri padang)*. Jurnal. Akuntansi & Manajemen Vol 7 No.2 Hal 24-35. Desember 2012 ISSN 1858-3687. (<http://repo.polinpdg.ac.id/457/1/583-573-1-PB.pdf>). Diakses tanggal 05 Desember 2016.
- Yohanes Y. Subiyantoro. 2011. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas pada Badan Perencanaan Pembangunan kota (BAPPEKO) kotamojokerto*. Jurnal, Hal 17-26. Program Studi/Jurusan Sistem Informasi. STIKOM Surabaya. (<http://sir.stikom.edu/493/>). Diakses tanggal 06 Desember 2016

